



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, perlu membuat roadmap reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Road Map Reformasi Birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan road map reformasi birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Road map sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2020

Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



MAHSUSI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan selaras dengan RPJMN 2020-2024 dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik dan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan melayani, maka diperlukan peta jalan yang disebut road map reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan untuk menjawab tuntutan terhadap 8 (delapan) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tatalaksana (*bussiness process*), penataan peraturan perundang-undangan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya kriteria keberhasilan terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi tersebut ditunjukkan dengan hasil capaian (*outcomes*) pada tingkat kepuasan masyarakat atau pengguna layanan, peningkatan profesionalisme SDM Aparatur serta sampai sejauh mana pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

Tuntutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan juga diharapkan mempunyai dampak positif yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), keberhasilan pelaksanaan *Quick Wins*, signifikansi perbaikan perubahan perilaku pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, pandangan para pengguna layanan, serta meningkatnya komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

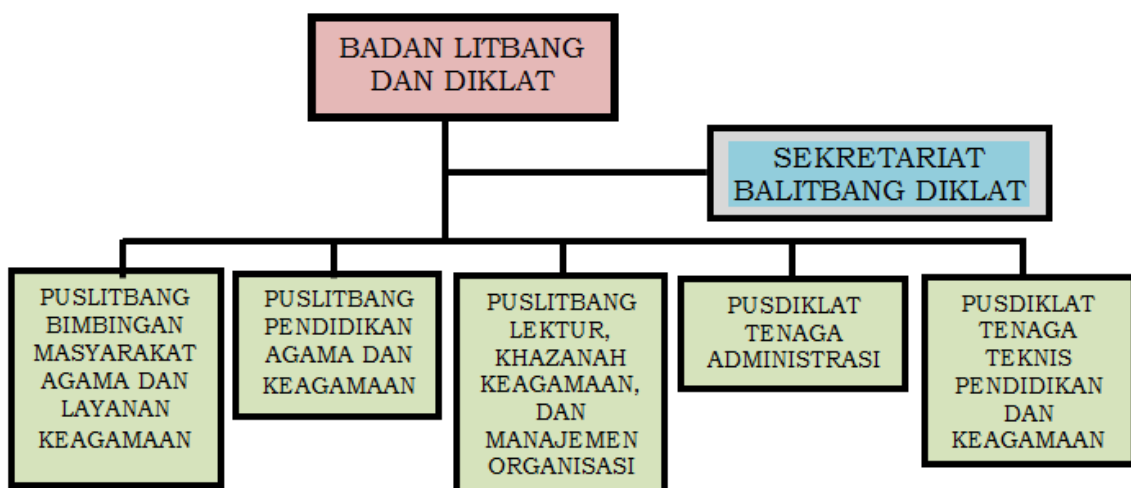
Road Map Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 yang berisi rencana kerja rinci dan berkelanjutan, serta menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang meliputi tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian atau hasil, pelaksana, penanggungjawab, dan dukungan yang dibutuhkan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pelatihan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

Susunan organisasi tersebut tergambar pada diagram berikut



C. VISI DAN MISI

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Penelitian dan

Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, Visi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan 2020 – 2024 adalah :

VISI

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama periode 2020 – 2024 adalah “Terwujudnya bahan kebijakan Kementerian Agama berbasis penelitian dan pengembangan, serta terpenuhinya Kompetensi sumberdaya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul”.

MISI

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama periode 2020-2024 adalah:

1. Menyediakan layanan data, informasi dan bahan kebijakan serta memperkuat jejaring penelitian, pengembangan dan pengkajian;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul melalui layanan Pelatihan;
3. Meningkatkan kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur’an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
4. Meningkatkan layanan dan tatakelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

TUJUAN STRATEGIS

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan adalah, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan sebagai poros data, informasi dan bahan kebijakan Kementerian Agama.
2. Terpenuhinya kompetensi sumber daya manusia kementerian agama Yang Profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul
3. Terwujudnya layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur’an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas
4. Terwujudnya tatakelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

D. BUDAYA KERJA

Sejalan dengan upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan pelayanan birokrasi melalui Revolusi Mental, Menteri Agama menetapkan 5 (lima) Nilai Budaya Kerja Badan Penelitian dan

Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi acuan bersama setiap pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, mulai dari pimpinan hingga pelaksana atau Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Adapun kelima nilai budaya kerja itu adalah:

1. **Integritas**, yaitu keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Dimaknai sebuah konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.
2. **Profesionalitas**, yaitu bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Mencerminkan kompetensi dan keahlian. Pegawai yang profesional harus dapat mengemban amanah dengan baik guna memperoleh proses dan hasil yang optimal.
3. **Inovasi**, yaitu menyempurnakan yang sudah ada dan megkreasi hal baru yang lebih baik. Menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat, karena birokrat bukanlah mesin karenanya dituntut untuk berinovasi dan tidak lagi terjebak terhadap rutinitas.
4. **Tanggung jawab**, yaitu bekerja secara tuntas dan konsekuen. Aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan harus mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa kiprah mereka di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan itu harus dipertanggungjawabkan, inilah cara kita untuk selalu membentengi diri kita untuk selalu on the track dalam mengemban kepercayaan dan menjalankan tugas dan pungsi masing-masing.
5. **Keteladanan**, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Mengajak kita menyadari bahwa sebagai aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan harus teladan di lingkungan masing-masing

BAB II

RENCANA PROGRAM DAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 - 2024

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2019

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan. Beberapa capaian tersebut adalah pemilihan para agen perubahan secara terbuka, pimpinan menjadi contoh teladan dalam perubahan, pimpinan memberikan kontribusi terhadap reformasi birokrasi, serta beberapa satuan kerja telah melakukan epmilihan pegawai teladan. Area struktur organisasi adalah diajukannya naskah

akademik pengusulan BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) sebagai struktur baru eselon I yang mempunyai peran dalam pengembangan SDM Kementerian Agama. Capaian area tatalaksana dan e-government adalah adanya bisnis baru yaitu penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan serta adanya prestasi atas sertifikasi kelembagaan seperti ISO, Diklat Kepemimpinan dan Latihan Dasar. Dalam e-governement telah dilakukan pembangunan aplikasi *e-office* yang memudahkan pekerjaan administrasi perkantoran seperti simdiklat, simlitbang, SIPPA, SIRA dan aplikasi lainnya yang pada masing-masing BDK/ BLA. Pembangunan Al-qur'an android, *e-pub* untuk tunanetra, serta pengkajian al-qur'an seperti tafsir tematis, tafsir wajib dan lainnya. Area manajemen SDM telah dilakukan perekrutan CPNS secara terbuka dan transparan serta rotasi atau mutasi pejabat/ pegawai, penilaian angka kredit peneliti dan widyaiswara berbasis elektronik serta inpassing pegawai menjadi jabatan fungsional seperti Pentashih, Arsiparis, Analis Kepegawaian dan Jabatan Fungsional dalam bidang keuangan. Dalam area akuntabilitas nilai SAKIP Balitbangdiklat berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal adalah 81.04 (tahun 2019) dan adanya evaluasi berkala yang dilakukan oleh Pimpinan. Selain itu dalam bidang penelitian telah dilakukan survey yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agama seperti survey indeks kerukunan, indeks karakter siswa, survey indeks kepuasan haji dalam negeri dan lainnya. dalam area pengawasan telah ditindaklanjuti hasil temuan, pembangunan lemari gratifikasi pada setiap satuan kerja serta sosialisasi masif oleh widyaiswara terkait tolak gratifikasi. Prestasi pelaksanaan reformasi yang membanggakan adalah salah satu satuan kerja yaitu Balai Diklat Kegamaan (BDK) Semarang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2019. Area pelayanan publik telah dilakukan survey indeks kepuasan layanan pentashihan dan pelayanan museum bayt al-qur'an secara berkala. Inovasi dalam pelayanan tashih adalah adanya sistem elektronik dalam pendaftaran layanan tashih.

B. Rencana Program Reformasi Birokrasi 2020-2024

Program Reformasi Birokrasi 2020-2024 disusun sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi sebelumnya dengan penekanan pada beberapa area perubahan yaitu, sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Perubahan merupakan keniscayaan bagi sebuah organisasi yang sedang melaksanakan reformasi birokrasi. Perubahan tersebut dilaksanakan dalam rangka mentransformasi keadaan organisasi saat ini menjadi keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan tersebut meliputi struktur, proses, orang, pola pikir, dan budaya kerja. Pelaksanakan perubahan ini tidak mudah mengingat perubahan seringkali sulit diterima oleh individu di dalam organisasi. Diperlukan komunikasi, tranparansi, dan keterlibatan semua pihak

untuk dapat mengurangi resistensi tersebut dan memunculkan dukungan dalam proses perubahan.

Dalam mengelola perubahan di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, langkah-langkah yang dilakukan pada reformasi pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

Adapun Program Reformasi Birokrasi (RB) aspek manajemen perubahan meliputi:

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
- b. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi
- c. Penyusunan Program Zona Integritas per-unit kerja
- d. Pemilihan agen perubahan
- e. Survey Integritas Organisasi
- f. Program penghematan kertas dan optimalisasi peran IT/e-government
- g. Program peningkatan budaya saling asuh antara pegawai
- h. Inovasi pada area Manajemen Perubahan

Indikator keberhasilan adalah indeks manajemen perubahan yang diukur oleh:

- a. Dimensi sosialisasi reformasi birokrasi
- b. Dimensi satuan kerja yang melaksanakan zona integritas
- c. Dimensi kepemimpinan
- d. Dimensi inovasi budaya kerja
- e. Dimensi pemilihan pegawai teladan
- f. Dimensi implementasi agen perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dalam upaya penerapan reformasi birokrasi yang terpadu, keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu hal yang fundamental, tidak hanya untuk penyediaan aturan, namun juga untuk menyempurnakan atau bahkan juga menghapuskan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan yang dipandang sudah tidak relevan, tumpang tindih, atau terjadi disharmoni dengan peraturan lainnya.

Program Reformasi Birokrasi (RB) aspek Penataan Peraturan Perundang-undangan ini meliputi:

- a. Kajian, harmonisasi dan evaluasi regulasi yang ada di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan
- b. Penyusunan sistem pengendalian peraturan perundangan

Keberhasilan dimensi ini diukur oleh tepat waktunya setiap regulasi yang dihasilkan.

3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan (Organisasi)

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan yang ditetapkan dengan PMA 42 Tahun 2016 merupakan gambaran umum dan bersifat makro mengenai tugas dan fungsi dalam suatu unit organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, baik di instansi pusat maupun instansi vertikal. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi diharapkan sudah sesuai dengan kebutuhan untuk melayani *stakeholder* yang terkait dengan unit-unit organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan dalam meningkatkan pelayanan publik.

Keberhasilan reformasi birokrasi khususnya dalam penataan dan penguatan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan yang berorientasi pada hasil yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui pembenahan sebagai berikut:

Program Reformasi Birokrasi (RB) aspek Penataan dan Penguatan Kelembagaan (Organisasi) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian terhadap struktur Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Balai Diklat Keagamaan (BDK), Balai Litbang Agama (BLA) atau kajian PMA 42 Tahun 2016
- b. Pengusulan BPSDM
- c. Pengusulan BDK baru yaitu: BDK Riau dan BDK Lampung
- d. Perubahan nama Balai Diklat keagamaan menjadi Balai Pelatihan Keagamaan (BPK)
- e. Perluasan kerjasama kelembagaan (MoU)
- f. Evaluasi Kinerja perpustakaan seluruh satker (pusat dan daerah)
- g. Akreditasi Museum Bayt Al-Qur'an
- h. Akreditasi Perpustakaan Pusat (Balitbangdiklat)
- i. Lomba Inovasi antara Satuan Kerja dan Penghargaan satuan kerja terbaik
- j. Pembangunan Corporate University (Pembelajaran Terintegrasi)

Indikator utama keberhasilan area ini adalah berdirinya BPSDM, pembangunan corporate university (pembelajaran Terintegrasi), terakreditasi A pada Tata kelola Museum Bayt Al-Qur'an dan Perpustakaan, Indeks evaluasi kelembagaan dan indeks kesehatan organisasi.

4. Penguatan Tata Laksana dan e-Government

Reformasi birokrasi di bidang tata laksana mengalami percepatan sejak lahirnya PMA 42 tahun 2016. Pedoman Penyusunan SOP merupakan produk terpenting yang menunjang reformasi ketatalaksanaan di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan sehingga setiap pelaksanaan kegiatan mempunyai acuan SOP yang jelas. Dengan adanya SOP, setiap kegiatan yang dilaksanakan akan lebih mudah dilakukan penilaian dan evaluasi. Penyusunan SOP pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan selalu memperhatikan prinsip-prinsip standar pelayanan publik serta sinergi antara pemberi layanan dan penerima layanan. Standar pelayanan publik kini menjadi keharusan bagi setiap organisasi pemerintah untuk menyusun dan mengawal implementasinya.

Program Reformasi Birokrasi aspek Tata Laksana dan e-Government adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi pelaksanaan SOP dan revisi dan pemutakhiran SOP: validasi SOP Sekretariat, evaluasi SOP Puslitbang, evaluasi SOP Lajnah PMQ
- b. Pembuatan grand design TI (aplikasi)
- c. Penerapan kearsifan modern
- d. Pembuatan Roadmap e-government (aplikasi yang terintegrasi)
- e. Penyusunan regulasi keterbukaan informasi publik (hasil penelitian, kediklatan, Renstra, Perkin, laporan kinerja, RKAKL, dan lainnya)
- f. Perbaikan Peta Proses Bisnis yang mempunyai relasi dengan kinerja
- g. Pembangunan aplikasi dukungan manajemen e-office terintegrasi
- h. Pembangunan e-pjj atau elektronik pelatihan jarak jauh di seluruh satuan kerja kediklatan.
- i. Memperluas penyebaran hasil penelitian dengan beberapa aspek:
 - 1) Integrasi Perpustakaan Website (menggabungkan seluruh unit perpustakaan disatuan kerja Balitbangdiklat terintegrasi dalam basis data website. (koordinasi di Sekretariat)
 - 2) Digitalisasi Hasil Penelitian
 - 3) Mengkuantifikasi hasil Penelitian yang diunduh Ke Simlitbang, Ke website dan menghitung tingkat kunjungan / unduhan hasil penelitian

- 4) Hasil Penelitian Yang Dikirim Ke Jurnal Nasional/ Internasional
- 5) Peningkatan akreditasi Jurnal (Semua jurnal yang ada di Balitbangdiklat)
- 6) Peningkatan akreditasi jurnal Balitbangdiklat menjadi jurnal internasional
- 7) Mempromosikan produk Balitbangdiklat (jurnal, website, hasil penelitian, dll) ke lembaga lain
- 8) Meningkatkan jumlah tulisan yang dimuat di website

Indikator utama keberhasilan area tatalaksana dan e-government adalah terbangunnya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yaitu terbangunnya sistem e-office terintegrasi, pembangunan pelatihan jarak jauh melalui elektronik diseluruh satuan kerja kediklatan, perluasan publikasi hasil penelitian, kediklatan serta kelajnanan, semua satuan kerja mempunyai OJS (Open Journal System), indeks tata kelola arsip, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian Al-qur'an oleh masyarakat.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Perubahan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan membutuhkan daya dukung SDM yang memenuhi persyaratan kompetensi guna tercapainya kinerja yang efisien dan efektif.

Program aspek Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan corporate university (penyusunan regulasi, pemetaan SDM dan pembangunan sistem)
- b. Peningkatan sistem AKD (Pemetaan pegawai internal dan eksternal mengikuti pelatihan)
- c. Evaluasi kode etik, disiplin dan integritas pegawai
- d. Survey Indeks Profesionalisme ASN
- e. Peningkatan kualitas hasil alumni pelatihan
- f. Peningkatan kompetensi peneliti
- g. Peningkatan kompetensi widyaiswara
- h. Peningkatan kompetensi jabatan fungsional lainnya
- i. Peningkatan kompetensi jabatan pelaksana
- j. Program inpassing atau migrasi jabatan ke fungsional (penataan jabatan fungsional)/ perbaikan peta jabatan
- k. Penyesuaian jabatan struktural ke fungsional (program nasional)
- l. Pelayanan kepegawaian melalui aplikasi SIMPEL (tepat waktu, transparan dan terukur)

- m. Survey kepuasan pelayanan kepegawaian (pelayanan administrasi kepegawaian, pengurusan angka kredit widyaiswara dan peneliti)
- n. Tindak lanjut assessment (pemetaan kompetensi pegawai)
- o. Cascading IKU ke Kinerja Pegawai (Kesesuaian antara Perkin Pimpinan dengan SKP Pegawai sesuai PP.30/2019)

Indikator utama keberhasilan area ini adalah semua pegawai memperoleh pengembangan kompetensi baik pelatihan teknis maupun workshop, seminar atau bentuk lainnya, adanya talent manajemen SDM, dan peningkatan indeks profesionalisme ASN, indeks merit system.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan melalui upaya penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) dan perbaikan IKU. Organisasi pemerintah yang baik harus memiliki visi, misi, dan tujuan organisasi, serta upaya bagaimana mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan disebut dengan kinerja. Sehingga Akuntabilitas Kinerja dapat dikatakan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Program kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada area akuntabilitas adalah:

- a. Menyusun Renstra Balitbangdiklat 2020-2024
- b. Menyusun perjanjian kinerja Eselon II dan eselon III UPT
- c. Menyusun cascading indikator kinerja
- d. Menyusun instrumen validasi kesesuaian Renstra, Renja, perjanjian kinerja, program dan kegiatan (RKAKL)
- e. Menyusun regulasi Money follow performance (Anggaran diberikan pada satker berprestasi)
- f. Menyusun instrumen evaluasi implementasi SAKIP Balitbangdiklat (Evaluasi Internal)
- g. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP
- h. Evaluasi triwulanan capaian kinerja program dan anggaran Pusat dan Daerah/ UPT
- i. Monitoring pemanfaatan hasil penelitian ke stakeholders (survey dengan instrumen)
- j. Monitoring kinerja pemanfaatan alumni diklat (Pusdiklat dan BDK)

- k. Monitoring kinerja pelayanan publik (pentashihan dan museum bayt) pasca PNB

Indikator utama keberhasilan area ini adalah peningkatan nilai SAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Nilai SAKIP Evaluasi Internal seluruh satuan kerja, digunakannya hasil penelitian oleh stakeholders, para alumni diklat yang memberikan kontribusi pada perubahan organisasi serta hasil bidang pengkajian al-qur'an yang digunakan oleh masyarakat.

7. Pengawasan

Aspek pengawasan diperlukan untuk memberikan penyelenggaraan pemerintah yang bersih bebas KKN dan transparan. Program Reformasi Birokrasi aspek pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Program pembinaan zona integritas - satker BDK menuju WBK/WBBM
- b. Penyusunan peta risiko melalui aplikasi SIMPLI. Kemenag.go.id
- c. Survey Integritas organisasi (internal Balitbangdiklat)
- d. Penyusunan relasi bisnis, IKU dan risiko organisasi
- e. Pemetaan benturan kepentingan
- f. Tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan WBS
- g. Inovasi Tolak Gratifikasi
- h. Inovasi pengendalian internal
- i. Optimalisasi verifikasi dokumen keuangan hasil kegiatan untuk menurunkan temuan
- j. Penyederhanaan proses/ prosedur tata kelola keuangan
- k. Inovasi pengelolaan BMN
- l. Inovasi Pengendalian bidang kediklatan

Indikator utama keberhasilan area ini adalah ada satuan kerja memperoleh WBK setiap tahun dan seluruh satuan kerja memperoleh WBK tahun 2024.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat di bidang pelayanan keagamaan mendorong Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan untuk melakukan perubahan dan peningkatan di bidang pelayanan publik. Hal yang penting adalah tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

Berikut program Reformasi Birokrasi aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Evaluasi standar pelayanan
- b. Penyusunan standar pelayanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan
- c. Evaluasi SOP standar pelayanan
- d. Melakukan survey pelayanan publik (Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf AL-Qur'an, Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an)
- e. Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an
- f. Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan
- g. Indeks kepuasan layanan kediklatan
- h. Indeks persepsi anti korupsi
- i. Inovasi dalam pelayanan

Indikator keberhasilan utama dalam area ini adalah meningkatnya indeks kepuasan pelayanan dan indeks anti korupsi pada pelayanan pentashihan, pelayanan museum bayt al-qur'an, pelayanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan serta pelayanan pelatihan.

9. Program Quick Win

Program utama atau quick win Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan yaitu:

- a. Inovasi dalam pelayanan publik penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan
- b. Program pembangunan e-learning atau pelatihan jarak jauh melalui elektronik
- c. Pembangunan Corporate University pembelajaran pelatihan terintegrasi
- d. Inovasi pelayanan publik museum
- e. Konsultasi dan pendampingan perumusan kebijakan stakeholders berbasis hasil penelitian

10. Hasil Antara Reformasi Birokrasi

Untuk mengukur perubahan keberhasilan organisasi maka diperlukan ukuran yang sesuai dengan bisnis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan. Adapun ukuran keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Tata Kelola Arsip atau Pengawasan Kearsipan
- b. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Indeks Pengelolaan Keuangan
- d. Indeks Pengelolaan Aset
- e. Indeks Merit System

- f. Indeks Profesionalitas ASN
- g. Indeks Perencanaan
- h. Indeks Maturitas SPIP
- i. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
- j. Indeks Kesehatan organisasi
- k. Indeks Evaluasi Kelembagaan
- l. Indeks SAKIP Internal
- m. Indeks Kinerja Alumni Diklat
- n. Indeks Tata kelola Museum
- o. Indeks Budaya Kerja
- p. Indeks Inovasi kelembagaan
- q. Indeks Pemanfaatan hasil Penelitian

BAB III

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

Hal-hal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi namun belum tercantum dalam road map ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



MAHSUSI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA

Program Reformasi Birokrasi		Relasi dengan IKU	Tahun					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
A. MANAJEMEN PERUBAHAN								
1,1	Penyusunan roadmap program reformasi birokrasi (RB)	v	v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
1,2	Evaluasi program RB setiap triwulan		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
1,3	Pemilihan agen perubahan		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
1,4	Balitbangdiklat Go Green (hemat kertas dan peduli lingkungan)			v	v	v	v	Sekretariat, Bagian IV, Subbag TU
1,5	Pemilihan pegawai teladan se-balitbangdiklat			v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag Kepegawaian
1,6	Program peneliti saling asuh			v	v	v	v	Puslitbang, BLA
1,7	Program widyaiswara saling asuh			v	v	v	v	Pusdiklat/ BDK
1,8	Program pembimbingan peneliti/widyaiswara yang mengirim naskah/ tulisan ke jurnal internasional	v	v	v	v	v	v	Puslitbang, Pusdiklat, BDK, BLA
1,9	Program dukungan menjadi profesor riset		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag Kepegawaian
1,10	Program dukungan menjadi widyaiswara utama		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag Kepegawaian
1,11	Kompetisi Program inovasi integritas dan budaya organisasi dari masing-masing satker		v	v	v	v	v	Semua
B. REGULASI DAN PERUNDANGAN								
2,1	Pemetaan regulasi		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag Hukum
2,2	harmonisasi regulasi		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag Hukum
C. STRUKTUR ORGANISASI								
3,1	usulan BPSDM		v	v				Pusdiklat, Sekretariat
3,2	usulan BDK Riau dan BDK Lampung		v					Pusdiklat, Sekretariat
3,3	Evaluasi kinerja organisasi		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
3,4	Perubahan nama Balai Diklat keagamaan menjadi Balai Pelatihan Keagamaan (BPK)		v					Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
3,5	Perluasan kerjasama kelembagaan (MoU)		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Diseminasi
3,6	Evaluasi Kinerja perpustakaan seluruh satker (pusat dan daerah)		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian IV, Subbag Perpustakaan
3,7	Akreditasi Museum bay Al-Qur'an	v			v	v	v	Lajnah, Bidang Museum
3,8	Akreditasi Perpustakaan Pusat (balitbangdiklat)	v			v	v	v	Sekretariat, Bagian IV, Subbag Perpustakaan
3,9	Lomba Inovasi antara BDK	v	v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
3,10	Penghargaan satker terbaik		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Pelaporan
3,11	Pembangunan Corporate University (Pembelajaran terintegrasi)			v	v	v	v	Pusdiklat, Sekretariat
D. TATALAKSANA DAN E-GOVERNMENT								
4,1	Evaluasi peta proses bisnis		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
4,2	Evaluasi SOP		v	v	v	v	v	
	a SOP Museum bayt		v					Sekretariat, Lajnah
	b SOP pentashihan			v				Sekretariat, Lajnah
	c SOP Sekretariat			v				Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
	d SOP Pusdiklat			v				Sekretariat, Pusdiklat
	e SOP Puslitbang			v				Sekretariat, Puslitbang
	f Standarisasi SOP BDK			v				Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala

	g	Standarisasi SOP BLA			v				Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
4,3		Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO		v	v	v	v	v	Pusdiklat
4,4		Akreditasi Diklat kepemimpinan III	v	v					Pusdiklat Adm
4,5		akreditasi Diklat kepemimpinan IV pada BDK	v	v	v	v	v	v	Pusdiklat Adm dan BDK
4,6		Akreditasi Diklat Latsar pada BDK	v	v	v	v	v	v	Pusdiklat Adm dan BDK
4,7		Penjaminan mutu penyelenggaraan diklat (Survey Internal)	v	v	v	v	v	v	Pusdiklat
4,8		Standarisasi instrumen pengukuran indeks kepuasan peserta diklat, revitalisasi kurikulum dan bahan ajar, standar mutu kediklatan, dan petunjuk teknis kediklatan		v					Pusdiklat
4,9		Standarisasi instrumen pengukuran indeks kepuasan pengguna diklat (Evaluasi pasca Diklat)		v					Pusdiklat
5,0		Evaluasi pemanfaatan alumni diklat	v	v	v	v	v	v	Pusdiklat dan BDK
5,1		Evaluasi pengguna produk kediklatan	v	v	v	v	v	v	Pusdiklat dan BDK
5,2		Evaluasi kurikulum dan produk kediklatan		v	v	v	v	v	Pusdiklat
5,3		Evaluasi perpustakaan / OPAC		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian IV, Subbag Perpustakaan
5,4		Evaluasi tata kelola arsip Pusat dan Daerah/ UPT		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian IV, Subbag TU dan Ortala
5,5		Evakuasi Keterbukaan Informasi Publik		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Sisfo dan Diseminasi
5,6		Penyebarluasan hasil penelitian		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Sisfo dan Diseminasi
	a	Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	v	v	v	v	v	v	Sekretariat dan Puslitbang/BLA
	b	Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	v	v	v	v	v	v	Sekretariat dan Puslitbang/BLA
	c	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	v	v	v	v	v	v	Sekretariat dan Puslitbang/BLA
	d	Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	v	v	v	v	v	v	Sekretariat dan Puslitbang/BLA
	e	Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekeayaan Intelektual)	v	v	v	v	v	v	Sekretariat dan Puslitbang/BLA
	f	Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	v	v	v	v	v	v	Sekretariat dan Lajnah
	g	Hasil penelitian yang dipublikasikan lewat media massa (koran online), situs online	v	v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Diseminasi
	h	Evaluasi website pusat dan daerah		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Sisfo dan Diseminasi
	i	Penyebarluasan produk kelitbang melalui litbangdiklat.press (pemilihan produk litbang dan diklat terbaik untuk dicetak) dan disebarluaskan ke masyarakat		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Diseminasi
	j	Penyebarluasan hasil penelitian melalui media perpustakaan online		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Diseminasi
	k	penyebarluasan produk al-qur'an		v	v	v	v	v	Lajnah
	l	perluasan kerjasama pelatihan		v	v	v	v	v	Pusdiklat, BDK
5,7		Evaluasi e-Government Balitbangdiklat		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Sisfo dan Diseminasi
	a	Pengembangan aplikasi simlitbang			v				Sekretariat, bagian I, Subbag Sisfo
	b	Pengembangan aplikasi simdiklat		v	v				Sekretariat, bagian I, Subbag Sisfo
	c	Pengembangan aplikasi SIPPA			v	v	v	v	Sekretariat, bagian I, Subbag Sisfo
	d	Pengembangan aplikasi SIMPEL		v					Sekretariat, bagian I, Subbag Sisfo
	e	pengembangan aplikasi perpustakaan (OPAC)		v	v				Sekretariat, bagian I, Subbag Sisfo
	f	Pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis android			v				Sekretariat, bagian I, Subbag Sisfo
	g	Pengembangan al-qur'an android		v	v	v	v	v	Sekretariat, bagian I, Subbag Sisfo
	h	Pengembangan Produk kelajnah terkait al-qur'an berbasis elektronik		v	v	v	v	v	Sekretariat, bagian I, Subbag Sisfo
	i	Pengembangan aplikasi pelayanan pentashihan al-qur'an	v		v				Sekretariat, bagian I, Subbag Sisfo
	j	Pengembangan produk e-PUB (Khusus pelayanan al-qur'an untuk Tunanetra)			v				Sekretariat, bagian I, Subbag Sisfo

6,1	Menyusun renstra balitbang 2020-2024		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Perencanaan
6,2	Menyusun perjanjian kinerja Eselon II dan eselon III UPT		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Perencanaan
6,3	Menyusun casecading indikator kinerja		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Perencanaan
6,4	Menyusun instrumen validasi kesesuaian Renstra, Renja, perjanjian kinerja, program dan kegiatan (RKAKL)		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Perencanaan
6,5	Menyusun regulasi Money follow performance (Anggaran diberikan pada satker berprestasi)		v					Sekretariat, Bagian I, Subbag Perencanaan
6,6	Menyusun instrumen evaluasi implementasi SAKIP Balitbangdiklat (Evaluasi Internal)		v					Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
6,7	Melaksanakan evaluasi internal SAKIP		v	v	v	v	v	Sekretariat, Subbag Perencanaan, Ortala dan Pelaporan
6,8	Evaluasi triwulanan capaian kinerja program dan anggaran Pusat dan Daerah/ UPT		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Pelaporan
6,9	Evaluasi triwulanan capaian kinerja - perjanjian kinerja		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Pelaporan
6,10	Menyusun Tim SAKIP balitbangdiklat		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
6,11	Menyusun rencan aksi SAKIP	v	v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
6,12	Menyusun LAKIP		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
6,13	Melakukan evaluasi dan penilaian LAKIP satker Pusat dan Daerah / UPT		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
6,14	Monitoring pemanfaatan hasil penelitian ke stakeholders (survey dengan instrumen)	v	v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian I, Subbag Pelaporan, ortala dan Puslitbang/ BLA
6,15	Monitoring kinerja pemanfaatan alumni diklat (Pusdiklat dan BDK)	v	v	v	v	v	v	Pusdiklat, BDK
6,16	Monitoring kinerja pelayanan publik (pentashihan dan museum bayt) pasca PNB	v	v	v	v	v	v	Lajnah
G. PENGAWASAN								
7,1	Program pembinaan zona integritas - satker BDK menuju WBK/WBBM	v	v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
7,2	Jumlah satker yang memperoleh WBK	v	v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
7,3	Penyusunan peta risiko melalui aplikasi SIMPLI. Kemenag.go.id	v	v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
7,4	Survey Integritas organisasi (internal Balitbangdiklat)		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
7,5	Penyusunan relasi bisnis, IKU dan risiko organisasi		v	v				Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
7,6	Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Penelitian		v	v				Puslitbang, BLA
7,7	Pemetaan benturan kepentingan		v	v	v	v	v	Sekretariat, Subbag ortala dan BMN dan Keuangan
7,8	Tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat		v	v	v	v	v	Lajnah dan Sekretariat
7,9	Tindak lanjut WBS		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
7,10	Inovasi Tolak Gratifikasi (lemari gratifikasi dan sosialisasi masif tolak gratifikasi ke peserta diklat)		v	v	v			Pusdiklat, BDK
7,11	Inovasi pengendalian internal			v				Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
7,12	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
7,13	Optimalisasi verifikasi dokumen keuangan hasil kegiatan untuk menurunkan temuan		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian II Keuangan
7,14	Penyederhanaan proses/ prosedur tata kelola keuangan			v				Sekretariat, Bagian II Keuangan
7,15	Peningkatan status BMN		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian II, BMN
7,16	Pemetaan penghapusan BMN		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian II, BMN
7,18	Inovasi pengelolaan BMN			v				
7,19	Inovasi Pengendalian bidang kediklatan			v	v	v	v	Pusdiklat, BDK
H. PELAYANAN PUBLIK								
8,1	Evaluasi standar pelayanan		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
8,2	Penyusunan standar pelayanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan		v	v				Sekretariat dan Puslitbang
8,3	Evaluasi SOP standar pelayanan		v	v	v	v	v	Sekretariat, Bagian III, Subbag ortala
8,4	Melakukan survey pelayanan publik		v	v	v	v	v	

	a	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf AL-Qur'an	v	v	v	v	v	v	lajnah
	b	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	v	v	v	v	v	v	lajnah
	c	Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	v	v	v	v	v	v	lajnah
	d	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	v	v	v	v	v	v	Puslitbang
	e	Indeks kepuasan layanan kediklatan	v	v	v	v	v	v	Pusdiklat, BDK
	f	Indeks persepsi anti korupsi	v	v	v	v	v	v	Pusdiklat, BDK
8,5		Inovasi Pelayanan Publik		v	v	v	v	v	Semua Satker
I. QUICK WIN									
	a	Inovasi dalam pelayanan publik penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	v	v	v	v	v	v	Puslitbang
	b	Program pembangunan e-learning atau pelatihan jarak jauh melalui elektronik	v	v	v	v	v	v	Pusdiklat BDK
	c	Pembangunan Corporate University pembelajaran pelatihan terintegrasi		v	v	v	v	v	Pusdiklat, BDK
	d	Inovasi pelayanan publik museum		v	v	v	v	v	Lajnah
	e	Konsultasi dan pendampingan perumusan kebijakan stakeholders berbasis hasil penelitian		v	v	v	v	v	Puslitbang BLA
I. HASIL ANTARA									
	a	Indeks Tata Kelola Arsip atau Pengawasan Kearsipan	v	v	v	v	v	v	Sekretariat
	b	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	v	v	v	v	v	v	Sekretariat
	c	Indeks Pengelolaan Keuangan	v	v	v	v	v	v	Sekretariat
	d	Indeks Pengelolaan Aset	v	v	v	v	v	v	Sekretariat
	e	Indeks Merit System	v	v	v	v	v	v	Sekretariat
	f	Indeks Profesionalitas ASN	v		v	v	v	v	Sekretariat
	g	Indeks Perencanaan	v		v	v	v	v	Sekretariat
	h	Indeks Maturitas SPIP	v		v	v	v	v	Sekretariat
	i	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	v		v	v	v	v	Lajnah
	j	Indeks Kesehatan organisasi		v	v	v	v	v	Sekretariat
	k	Indeks Evaluasi Kelembagaan		v	v	v	v	v	Sekretariat
	m	Indeks SAKIP Internal	v		v	v	v	v	Sekretariat
	n	Indeks Kinerja Alumni Diklat		v	v	v	v	v	Pusdiklat BDK
	o	Indeks Tata kelola Museum		v	v	v	v	v	Lajnah
	p	Indeks Budaya Kerja		v	v	v	v	v	Sekretariat
	q	Indeks Inovasi kelembagaan		v	v	v	v	v	Sekretariat
	r	Indeks Pemanfaatan hasil Penelitian		v	v	v	v	v	Puslitbang BLA